

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengadaan Tanah dan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

1. Pengertian Pengadaan Tanah

Istilah “pengadaan tanah” secara yuridis pertama kali dikenal sejak keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Istilah pengadaan tanah berarti mengadakan atau menyediakan tanah.

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 sebagai pengganti Keppres diatas, disebutkan bahwa “Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut.”

Pasal 1 Angka 3 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagai pengganti Keppres diatas, disebutkan bahwa “pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah.”

Pasal 1 Angka 3 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 mengubah lagi pengertian pengadaan tanah, disebutkan bahwa “Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberi kanganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah”.

Pengaturan pengadaan tanah dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa “Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki obyek pengadaan tanah.

Obyek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan dan tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. Dalam Peraturan Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diatur asas-asas dalam pengadaan tanah yaitu, asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan.¹²

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam hal ini sebagai pejabat yang bertanggung jawab menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum. Pemerintah sebagai perpanjangan tangan rakyat memiliki wewenang untuk mengatur dan menjamin tersedianya tanah untuk kemudian dari pengadaan tanah tersebut manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.¹³

¹²Maria. S. W. Sumardjono, 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi dan Sosial*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Indonesia.

¹³ Rubaiae, Ahmad. 2007. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Malang: Bayu Media Publishing

2. Asas-Asas Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Untuk mencapai hal-hal seperti di atas tersebut, maka pengadaan tanah harus dilakukan sesuai dengan asas-asas berikut: ¹⁴

- a. Asas kesepakatan, yakni bahwa seluruh kegiatan pengadaan tanah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah. Kegiatan fisik pembangunan baru dapat dilaksanakan bila telah terjadi kesepakatan antara para pihak dan ganti kerugian telah diserahkan.
- b. Asas kemanfaatan, pengadaan tanah diharapkan mendatangkan dampak positif bagi pihak yang memerlukan tanah, masyarakat yang terkena dampak dari masyarakat luas. Manfaat dari hasil kegiatan pembangunan itu harus dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai keseluruhan.
- c. Asas keadilan, kepada masyarakat yang terkena dampak diberikan ganti kerugian yang dapat memulihkan kondisi sosial ekonominya, minimal setara dengan keadaan semula dengan memperhitungkan kerugian terhadap faktor fisik maupun nonfisik.
- d. Asas kepastian, pengadaan tanah dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga para pihak mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.
- e. Asas keterbukaan, dalam proses pengadaan tanah, masyarakat yang terkena dampak berhak memperoleh informasi tentang proyek dan dampaknya, kebijakan ganti kerugian, jadwal pembangunan, rencana

¹⁴ Arie, Sukanti. 2002. *Masalah Tanah dalam Kegiatan Ekonomi*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

pemukiman kembali dan lokasi pengganti (bila ada) dan hak masyarakat untuk menyampaikan keberatannya.

f. Asas keikutsertaan/ Partisipasi, peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam setiap tahap pengadaan tanah (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi) diperlukan agar menimbulkan rasa ikut memiliki dan dapat meminimalkan penolakan masyarakat terhadap kegiatan yang bersangkutan.

g. Asas kesetaraan, asas ini dimaksudkan untuk menempatkan posisi pihak yang memerlukan tanah dan pihak yang terkena dampak secara sejajar dalam proses pengadaan tanah.

f. Minimalisasi dampak dan kelangsungan kesejahteraan sosial ekonomi. Dampak negatif pengadaan tanah sedapat mungkin diminimalkan, disertai dengan upaya untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat yang terkena dampak sehingga kegiatan sosial ekonominya tidak mengalami kemunduran.

3. Tujuan Pengadaan Tanah

Tujuan pengadaan tanah adalah untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Proses pengadaan tanah terkait dengan penetapan lokasi yang akan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum harus sesuai dengan RT/RW. Rencana Pembangunan

Nasional/Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.¹⁵

Semakin banyaknya pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pada hakikatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum penting dilakukan, dimana memerlukan bidang tanah dalam jumlah yang besar. Tetap saja, pelaksanaannya perlu dilakukan secara cepat dan transparan dengan memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah.¹⁶

Berdasarkan definisi-definisi di atas, pengadaan tanah terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan hukum berupa pelepasan hak atas tanah menjadi tanah negara
- b. Pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum
- c. Perbuatan hukum didasarkan pada musyawarah dan kesukarelaan
- d. Disertai ganti rugi yang adil dan layak.

Berdasarkan uraian unsur pengadaan tanah tersebut, pengadaan tanah dilakukan dengan cara pelepasan hak atas tanah. Selain berdasarkan pelepasan hak, perolehan tanah untuk kepentingan umum juga dapat ditempuh melalui dengan cara lainnya. Boedi Harsono mengemukakan 4 cara memperoleh tanah dalam rangka pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum, yaitu:

- a. acara permohonan hak baru atas tanah;
- b. acara jual-beli tanah;

¹⁵ Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta: Djambatan.

¹⁶ Limbong, Benhard. 2011. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum*. Jakarta:Margaretha Pustaka.

- c. pembebasan hak atas tanah yang wajib diikuti dengan permohonan hak baru;
- d. pencabutan hak atas tanah yang wajib diikuti dengan permohonan hak baru.

4. Mekanisme atau Tata Cara Pengadaan Tanah

Dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) Keppres No 55 Tahun 1993 menyatakan bahwa cara pengadaan tanah ada dua macam yaitu pertama pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, dan kedua jual beli, tukar menukar, dan cara lain yang disepakati oleh pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya Perpres No 36 Tahun 2005, ada sedikit perbedaan dalam tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum, meskipun pada dasarnya sama dengan Kepres No 55 Tahun 1993 menurut pasal 2 ayat (1) Perpres No 36 Tahun 2005 menyatakan bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, atau pencabutan hak atas tanah.

Saat ini telah disahkan Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang merupakan Undang-Undang yang ditunggu-tunggu, peraturan perundang-undangan sebelumnya dianggap belum memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang kehilangan tanahnya. Bunyi ketentuan umum pasal 1 angka 2 undang-undang ini: “ pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”.

Pasal 1 angka 10 menegaskan lagi “ganti kerugian adalah penggantian layak dan adil kepada yang berhak dalam proses pengadaan tanah”.

1. Pengertian Kepentingan Umum

Kegiatan perolehan tanah oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan ditujukan kepada pemenuhan kepentingan umum. Pembebasan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁷

Istilah kepentingan umum diatur dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:

“Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Beberapa pakar hukum memberikan definisi yang mampu menjelaskan konsep kepentingan umum. Menurut Pound kepentingan umum adalah kepentingan-kepentingan dari Negara sebagai badan hukum dan menjaga kepentingan-kepentingan masyarakat. Menurut Julius Stone kepentingan umum adalah suatu keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, penguasa, serta Negara. Pengertian kepentingan umum dibatasi untuk kepentingan pembangunan yang tidak bertujuan komersial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum ada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menentukan bahwa “Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat

¹⁷ Andrian Sutedi, 2006, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.

yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Huybers dalam bukunya Filsafat Hukum dan Lintasan Sejarah mendefinisikan kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan yang memiliki ciri-ciri tertentu antara lain menyangkut perlindungan hak-hak individu sebagai warga Negara dan menyangkut pengadaan serta pemeliharaan sarana publik dan pelayanan public.¹⁸

Maria Sumardjono menyatakan bahwa “kepentingan umum selain harus memenuhi “peruntukannya” juga harus dapat dirasakan “kemanfaatannya”. Pemenuhan unsur pemanfaatan tersebut agar dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan dan/atau secara langsung. Selain itu, juga perlu ditentukan “siapakah” yang dapat melaksanakan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dalam konsep kepentingan umum.¹⁹

Batasan tentang pengertian kepentingan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut masih terlihat abstrak sehingga menimbulkan penafsiran berbeda-beda dalam masyarakat. Beberapa jenis kegiatan pembangunan tidak menunjukkan sasaran kearah jenis kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, setiap upaya pelaksanaan satu kegiatan yang akan dikaitkan dengan kepentingan umum

¹⁸ John, Salindeho, 1987, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁹ Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, 2004, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta : Mitra Kebijakan Pertanahan Indonesia.

hendaknya didahului dengan kajian dalam bentuk memastikan bahwa kegiatan tersebut benar-benar merupakan *socially profitable*.²⁰

2. Jenis-Jenis Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Jenis-jenis Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jenis pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah :

Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan :

- a. Pertahanan dan keamanan nasional;
- b. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- c. Waduk, bendungan, bending, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- d. Pelabuhan, Bandar udara, dan terminal;
- e. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- g. Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
- h. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. Rumah sakit Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
- j. Fasilitas keselamatan umum;
- k. Tempat pemakaman umum Pemerintah/ Pemerintah Daerah;

²⁰ Ibid.

- l. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. Cagar alam dan cagar budaya;
- n. Kantor;
- o. Kantor Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ desa;
- p. Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/ atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- q. Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- r. Prasarana olahraga Pemerintah/ Pemerintah Daerah; dan
- s. Pasar umum dan lapangan parkir umum.

B. Tinjauan Tentang Ganti Rugi Pembebasan Tanah

1. Pengertian Ganti Rugi

Pengertian ganti kerugian menurut Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 dalam Pasal 1 angka 7 adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan tanah. Pengertian ini kemudian diperlengkap dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah. Pengertian ini kemudian diubah lagi di dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2012 dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Pengertian ganti rugi dalam undang-undang ini menekankan pada aspek kelayakan dan keadilan bagi pemegang hak atas tanah.

Bentuk ganti rugi yang ditawarkan seharusnya tidak hanya ganti kerugian fisik yang hilang, tetapi juga harus menghitung ganti kerugian non fisik seperti pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dipindahkan ke lokasi yang baru. Sepatutnya pemberian ganti kerugian tersebut harus tidak membawa dampak kerugian kepada pemegang hak-hak atas tanah yang kehilangan haknya tersebut melainkan membawa dampak pada tingkat kehidupan yang lebih baik atau minimal sama pada waktu sebelum terjadinya kegiatan pembangunan.²¹

2. Asas-Asas Ganti Rugi

Ganti rugi harus diberikan kepada setiap orang yang berhak berdasarkan asas *nemo plus juris*, yaitu pemegang hak atas tanah, pemilik bangunan maupun benda-benda yang ada dan melekat pada tanah. Ganti rugi merupakan hak mutlak dari para pemegang hak atas tanah yang melepaskan tanahnya untuk kepentingan umum, tidak ada kewenangan pada negara untuk mengambil tanah tanpa adanya suatu ganti rugi. Indonesia bukan negara yang berideologi komunis yang memungkinkan penyitaan tanah tanpa ganti rugi. Penyitaan tanah hanya dimungkinkan bagi tanah-

²¹ R. Setiawan. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.

tanah hasil kejahatan. Terdapat sejumlah prinsip-prinsip dasar ganti rugi yang harus dijadikan pedoman, antara lain:²²

a. Asas itikad baik

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dilandasi adanya itikad baik dalam menentukan besarnya ganti rugi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

b. Asas keseimbangan

Pemberian ganti rugi harus mendatangkan kesejahteraan bersama. Ganti rugi diberikan sesuai dengan alas hak yang dimiliki oleh pemilik tanah. Pembayaran ganti rugi tidak boleh disamaratakan antara yang sudah mempunyai alas hak dengan yang tidak mempunyai alas hak meskipun terletak di lokasi yang sama.

c. Asas kepatutan

Nilai ganti rugi haruslah layak dan patut berdasarkan nilai nyata dari tanah dan/atau segala yang menjadi turunannya. Harga yang didasarkan kepada nilai nyata tidak harus sama dengan harga umum mengingat harga umum dapat saja merupakan harga catut. Sebaliknya, harga atas tanah tersebut juga dapat menjadi harga yang lebih tinggi.

d. Asas kepastian hukum

Ketentuan mengenai ganti rugi tanah harus diatur dalam undang-undang khusus yang mengaturnya. Undang-undang tersebut harus memuat sanksi-sanksi hukumnya, baik yang bersifat penal dan non-penal sehingga yang diambil selalu berpegangan pada kewajaran dan keadilan.

²² Limbong, Benhard. 2011. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum*. Jakarta:Margaretha Pustaka.

e. Asas kesejahteraan

Asas ini menghendaki perlindungan terhadap pihak yang melepaskan tanah dari sisi ekonomisnya.

3. Bentuk dan Jenis Ganti Rugi

Bentuk ganti rugi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 berupa uang, tanah dan/atau fasilitas – fasilitas lain. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 mengatur bentuk ganti kerugian berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, gabungan dari dua atau lebih, dan bentuk lain yang disetujui oleh pihak yang bersangkutan serta untuk ulayat diberi dengan bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 mengatur ganti rugi berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, bisa juga berupa kompensasi berupa penyertaan modal (saham). Untuk tanah ulayat diberi dengan bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 mengatur ganti rugi dapat berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, gabungan dari dua atau lebih, dan bentuk lain yang disetujui oleh pihak yang bersangkutan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 mengatur bentuk ganti rugi selain uang dapat berupa: tanah/bangunan pengganti/pemukiman kembali sesuai dengan yang dikehendaki pemilik dan disepakati instansi yang memerlukan tanah, tanah/bangunan/fasilitas lain dengan nilai paling kurang sama dengan benda wakaf yang dilepaskan

untuk harta benda wakaf, recognisi berupa fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat untuk tanah ulayat, sesuai keputusan pejabat yang berwenang untuk tanah instansi pemerintah/pemda.

Dalam Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diatur mengenai bentuk ganti kerugian dapat diberikan berupa: uang; tanah pengganti; permukiman kembali; kepemilikan saham; atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud diatas baik terdiri dari satu jenis maupun gabungan dari beberapa jenis ganti kerugian, diberikan sesuai dengan nilai Ganti Kerugian yang nominalnya sama dengan nilai yang telah disepakati bersama.²³

4. Dasar Perhitungan Ganti Rugi

Pemberian ganti rugi bagi kepentingan umum seringkali menjadi masalah berlarut-larut sehingga menyebabkan tertundanya pembangunan. Standar kita saat ini yang mengatur tentang penilaian tanah masih sangat minimal. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo 65 Tahun 2006 menegaskan bahwa "Dasar perhitungan besarnya ganti rugi (atas nilai tanah) didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia".

²³ Ten, Haar. 1987. *Masalah Tanah dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Namun demikian saat ini sudah diatur lebih lanjut pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 bahwa untuk menentukan nilai nyata/sebenarnya dapat berpedoman pada variabel-variabel seperti lokasi dan letak tanah, status tanah, peruntukan tanah, kesesuai penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada; sarana dan prasarana yang tersedia dan faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah. Jika kita kaitkan variabel untuk menentukan nilai nyata/sebenarnya tersebut dengan teori yang ada, maka dapat disetarakan bahwa yang dimaksud dengan nilai nyata/sebenarnya adalah nilai pasar.

5. Mekanisme Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah

Untuk melaksanakan ganti rugi dalam pengadaan tanah, dalam setiap peraturan pengadaan tanah mempunyai mekanisme. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 mekanismenya sederhana yaitu: pemilik tanah yang tanahnya akan dilepas jika menyetujui ganti rugi maka instansi yang bersangkutan langsung membayarkan ganti rugi, kemudian instansi yang bersangkutan langsung berhubungan dengan pejabat yang berwenang untuk memohon hak.

Tapi apabila pemilik tanah tidak menyetujui ganti rugi maka pemilik memberikan alasan penolakan ganti rugi kepada panitia pengadaan tanah. Panitia pengadaan tanah dan kemudian bisa langsung mengambil 2 jalan yaitu tetap pada keputusan semula atau melimpahkan kepada gubernur setempat dimana gubernur bisa mencari jalan tengah atau mengukuhkan keputusan panitia.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 mengatur mekanisme pengadaan tanah apabila pemilik tanah yang setuju dengan ganti kerugian maka kedua belah pihak yang membutuhkan langsung ke PPT dan mengurus SK tentang bentuk dan besarnya ganti kerugian. Apabila tidak setuju maka panitia pengadaan tanah langsung membawa kepada gubernur. Setelah itu gubernur bisa mengubah keputusan PPT atau dapat juga mengukuhkan keputusan PPT. tetapi apabila tetap menolak maka diusulkan untuk pencabutan dan dirujuk kepada Menteri Dalam Negeri yang kemudian ditembuskan kepada instansi yang membutuhkan tanah dan Menteri Kehakiman dan HAM serta Presiden.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 mengatur mekanisme ganti rugi apabila pemilik tanah menolak ganti rugi maka PPT mengajukan kepada Walikota, Bupati atau Gubernur yang bisa mengukuhkan atau mengubah keputusan PPT. tetapi jika masih ditolak maka akan dilakukan pencabutan dimana Kepala Badan Pertanahan Nasional membuat tembusan kepada Presiden dan instansi yang terkait serta Menteri Kehakiman.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Mekanisme menurut peraturan ini adalah jika pemilik tanah menolak ganti rugi maka PPT mengajukan kepada Walikota, Bupati atau Gubernur yang bisa mengukuhkan atau mengubah keputusan PPT. Tetapi jika masih ditolak maka akan dilakukan pencabutan dimana Kepala Badan Pertanahan Nasional membuat tembusan kepada Presiden dan instansi yang terkait serta Menteri Kehakiman. Tetapi jika tetap menolak ganti rugi yang sudah

ditetapkan dalam Keputusan Presiden, maka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

Kemudian pada peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 adalah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 mekanisme ganti rugi menurut peraturan ini adalah jika pemilik hak atas tanah setuju maka instansi membuat tanda terima. Kemudian penerima ganti rugi membuat surat pernyataan pelepasan atau penyerahan hak. Kemudian PPT membuat berita acara pelepasan hak dan pembayaran ganti rugi. Tetapi jika pemilik hak menolak maka PPT meneruskan kepada Walikota, Bupati atau Gubernur dan MENDAGRI yang bisa mengukuhkan keputusan PPT atau mengubah keputusan PPT, jika tetap menolak maka dilakukan pencabutan.

Dari perbandingan di atas dapat dilihat bahwa mekanisme pengadaan tanah harus diperbaiki. Karena belum sepenuhnya dapat memenuhi keinginan masyarakat. Oleh karena ini pemerintah harus lebih memperhatikan. Agar tidak terjadi konflik, walaupun semua yang dilakukan dalam semua peraturan ini, keputusan ganti rugi ataupun ganti kerugian didasarkan musyawarah. Musyawarah mencari jalan tengah sebagai jalan terbaik. Dan bukan keputusan sepihak dari pemerintah.

6. Pihak yang Berhak Menerima Ganti Rugi

Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 41 menyatakan bahwa:

- a. Ganti kerugian diberikan kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37 ayat (2) dan/atau putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5).

b. Pada saat pemberian Ganti Kerugian Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian wajib:

- 1) melakukan pelepasan hak; dan
- 2) menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.

c. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan satu-satunya alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari.

d. Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan.

Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) tersebut di atas yang menyatakan bahwa Pihak yang Berhak harus menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan yang merupakan satu-satunya bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari hal ini mencerminkan Undang-Undang ini represif.

Menurut Pasal 37 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menyatakan Apabila Hak Guna Bangunan atas tanah Negara hapus dan tidak diperpanjang atau tidak diperbaharui, maka bekas pemegang Hak Guna Bangunan wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanahnya kepada Negara dalam keadaan kosong

selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak hapusnya Hak Guna Bangunan. Dengan demikian jelas bahwa HGB atas tanah Negara yang telah hapus kembali kepada Negara sehingga tidak boleh untuk diganti rugi.

C. Tinjauan Tentang Pertimbangan Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan

Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan (*judgement*) hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.²⁴ Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim akan bermusyawarah untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya di antara para pihak serta putusan seperti apa yang akan dijatuhkan.²⁵

Putusan dalam pengertian lain adalah penentuan atau penetapan hakim mengenai hak-hak tertentu serta hubungan hukum di antara para pihak untuk menyelesaikan persengketaan di antara mereka. Sudikmo Mertokusumo mendefinisikan putusan sebagai pernyataan hakim dalam kedudukannya sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di antara pihak-pihak yang berperkara.²⁶

2. Mekanisme Pengambilan Putusan oleh Hakim

Pengambilan putusan oleh hakim dilakukan setelah seluruh tahap pembuktian selesai dan para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing. Sebelum memutus perkara tersebut, majelis hakim akan

²⁴ Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

²⁵ M. Natsir Asnawi, 2014, *Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press.

²⁶ Sudikmo Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

melakukan musyawarah majelis untuk mendiskusikan dan menyimpulkan perkara tersebut. Pasal 178 Ayat 1 HIR/189 Ayat 1 R.Bg menyatakan:

*“hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak”.*²⁷

Dalam musyawarah majelis, paling tidak majelis hakim akan melakukan dua hal, yaitu:

- a. Menetapkan pihak mana yang berhasil membuktikan dan pihak mana yang tidak berhasil membuktikan.

Pada tahap ini, tiap hakim anggota majelis akan mengemukakan pendapatnya mengenai keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan setelah masing-masing pihak diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalilnya. Masing-masing hakim anggota majelis akan mempelajari secara seksama kesimpulan yang diajukan para pihak. Dalam bahasa hukum masing-masing hakim meng-*konstatir* fakta-fakta sebagai jalan untuk menetapkan hukumnya. Bila fakta-fakta tersebut telah dikemukakan, maka selanjutnya tiap hakim akan mengajukan konklusinya.

- b. Menetapkan hak-hak dan hubungan hukum diantara para pihak konklusi hakim yang diambil berdasarkan fakta-fakta tadi dapat berupa menetapkan siapa berhak atas apa (*who belong to what*) juga menetapkan hubungan hukum diantara para pihak. Sebagai contoh hakim menetapkan bahwa tergugat melakukan one prestasi kepada penggugat (hubungan

²⁷ Riduan Syahrani, 1991, *Himpunan Peraturan Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Alumni.

hukum). Dan karenanya tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat (kewajiban tergugat di satu sisi sementara hak penggugat di sisi lain).

Perbedaan pendapat diantara para hakim dapat terjadi pada salah satu tahapan atau bahkan kedua tahapan tersebut diatas. Hakim A misalnya menyimpulkan bahwa C terbukti melakukan wanprestasi karena adanya kesengajaan C untuk tidak membayar hutang, sementara hakim B menyimpulkan bahwa C tidak melakukan wanprestasi karena adanya unsur *force majeure* (keadaan memaksa) yang menyebabkan dia tidak dapat membayar hutangnya pada saat itu. Konklusi yang diambil masing-masing hakim pasti berbeda jika berangkat dari penalarannya terhadap fakta-fakta tersebut.²⁸

3. Asas-Asas dalam Putusan Hakim

Asas-asas dalam putusan hakim menurut M. Natsir Anawi adalah sebagai berikut:²⁹

a. Asas musyawarah majelis

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan:

“putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia”.

Putusan hakim harus didasarkan pada hasil musyawarah majelis. Hal ini merupakan keniscayaan dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. Segala pendapat atau argumentasi hukum dikemukakan oleh masing-masing hakim anggota majelis.

²⁸ M. Natsir Asnawi, 2014, *Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press.

²⁹ Ibid

b. Putusan harus memuat dasar/ alasan yang cukup

Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (*legal reasoning, ratio decidendi*) yang komprehensif. Putusan hakim yang tidak cukup pertimbangannya menyebabkan putusan tersebut dapat dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd*. Keadaan demikian merupakan permasalahan yuridis, karenanya dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

c. Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan

Salah satu asas yang sangat penting berkenaan dengan putusan hakim adalah kewajiban mengadili seluruh bagian gugatan. Apa yang dimaksud dengan seluruh bagian gugatan “seluruh bagian gugatan adalah segala sesuatu yang menjadi pokok persengketaan para pihak didalam gugatan. Dalam pengertian yang lebih sederhana, seluruh bagian gugatan adalah petitum penggugat, karena pada dasarnya setiap petitum dilandasi atau dilatari oleh posita (*fundamentum potendi*).

d. Asas *ultra petitum patium*

Asas *ultra petitum patium* adalah asas yang melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut penggugat dianggap telah melampaui kewenangannya (*ultra vires, beyond the power of his autory*) mengadili dengan cara mengabulkan melebihi apa yang digugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang salah meskipun dilakukan dengan itikad baik. Hal ini dikarenakan tindakan hakim yang demikian telah melanggar prinsip *de rule of law*.

e. Asas keterbukaan

Substansi utama dari asas keterbukaan adalah kewajiban untuk mengucapakan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Asas keterbukaan ini bertujuan agar putusan pengadilan agar lebih transparan dan akuntabel. Asas keterbukaan juga dimaksudkan untuk memberikan akses kepada publik yang ingin mengetahui langsung vonis pengadilan atas kasus tersebut.

f. Putusan harus tertulis

Argumentasi yang dapat dikemukakan mengapa putusan hakim (baca putusan pengadilan) harus tertulis adalah karena putusan sebagai produk pengadilan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak berperkara dan pihak ketiga. Sebagai akta autentik, putusan harus dibuat secara tertulis dengan memperhatikan sistematika tertentu dan syarat-syarat formil yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

4. Pengertian Pertimbangan Putusan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³⁰

³⁰ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:³¹

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

5. Macam-Macam Putusan Hakim

Hukum acara perdata mengenal dua macam putusan yaitu putusan akhir dan bukan putusan akhir hal ini sesuai dengan pasal 185 ayat (1) HIR:

a. Putusan akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat tinggi dan Mahkamah Agung. Terdapat dua jenis

³¹ Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman Bina Ilmu*, Surabaya.

putusan akhir yaitu putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan hukum yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan Undang-Undang, tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan tersebut. Sehingga putusan hakim ini tidak dapat diganggu gugat kecuali dengan upaya khusus yaitu upaya hukum luar biasa.

Mengenai ketentuan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Pasal 180 HIR hanya menyebutkan adanya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan Perundang-undangan masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum melawan putusan tersebut. Terhadap putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap ini dapat dilakukan upaya hukum perlawanan maupun banding.

b. Putusan bukan Putusan Akhir

Putusan bukan putusan akhir atau yang biasa disebut putusan sela atau putusan sementara adalah putusan yang diajukan sebelum putusan akhir, pengadilan menjatuhkan putusan sementara yang berfungsi untuk memungkinkan dan mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara selanjutnya. Pasal 185 HIR menentukan bahwa putusan sela harus diucapkan di persidangan, tidak dibuat secara tersendiri, melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Pasal 191 ayat (1)

HIR menentukan bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama dengan permintaan banding terhadap putusan akhir.

6. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.³²

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan

³² M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

D. Tinjauan Tentang Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum

Dalam membuat putusan, hakim harus memuat *idée des recht*, yang meliputi tiga unsur, yaitu: keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zwechtmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional. Namun dalam praktek peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut dalam satu putusan. Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada diantara dua titik pembatas dalam garis tersebut, yang mana berdiri pada titik keadilan dan kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan berada diantara keduanya.³³

Dalam menegakkan hukum ketiga hal ini harus mendapat perhatian yang seimbang secara profesional, meskipun dalam praktik sangat sulit mewujudkannya. Hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas tersebut diatas. Jangan sampai ada putusan hakim yang justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.

³³ Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

1. Asas Keadilan

Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif. Menurut Fance M. Wantu, memberikan kriteria keadilan, yaitu:³⁴

- a. adanya *equality* artinya memberikan persamaan hak dan kewajiban semua orang sama didepan hukum.
- b. adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dengan keadilan substansional berdasarkan efisiensi artinya prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- c. berdasarkan obyektif tiap perkara harus ditimbang sendiri mengandung autotorif yaitu memberikan jalan keluar untuk menciptakan stabilitas yakni memberikan rasa ketertiban dan ketentraman bagi para pihak dan masyarakat.

2. Asas Kepastian Hukum

Menurut Fance M. Wantu, kepastian hukum dirumuskan sebagai berikut:

- a. Melakukan solusi autotorif yaitu memberikan jalan keluar untuk menciptakan stabilitas yakni memberikan ketertiban dan ketentraman bagi para pihak dan masyarakat.
- b. Efisiensi prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- c. Sesuai dengan tujuan hukum yaitu Undang-Undang yang dijadikan dasar dari putusan untuk memberikan kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.
- d. Mengandung *equality* memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak.

³⁴ Algra, dkk, 1983, *Mula Hukum*, Jakarta: Binacipta.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya akan kaku dan akan menimbulkan rasa tak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-Undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan dengan ketat, sebab berlakulah *lex dura, sed tamen scripta*, Undang-Undang adalah keras, akan tetapi memang demikian bunyinya.

3. Asas Kemanfaatan

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.